

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG PENSIUN
DENGAN PERMINTAAN SENDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS SERTA IMPLEMENTASI DI KOTA PADANG DAN PADANG
PARIAMAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Pada Program PascaSarjana Fakultas Hukum

Universitas Andalas



Disusun Oleh :

RESKI NOVITA SYAHRUL

NIM : 1920122015

KOMISI PEMBIMBING

Dr. Azmi Fendri, S.H, M.Kn

Pembimbing I

Dr. Delfiyanti, SH., MH

Pembimbing II

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG
PENSIUN DENGAN PERMINTAAN SENDIRI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SERTA IMPLEMENTASI DI
KOTA PADANG DAN PADANG PARIAMAN**

**(Reski Novita Syahrul, 192012015, Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pembimbing Dr. Azmi Fendri, SH.,M.Kn.,
dan Dr. Delfiyanti, SH.MH)**

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun ada saat notaris akan berakhir masa jabatannya salah satu dengan berhenti dengan permintaan sendiri dan didalam UUJN juga dikatakan apabila notaris yang berhenti dengan permintaan sendiri wajib melaporkan kepada MPD dan menunjukan siapa yang akan menjadi Notaris pengganti untuk penyerahan protokol. Persoalannya adalah bagaimana proses penyerahan protokol bisa sampai kepada notaris pengganti dan terdapat permasalahan di dalam tesis ini yaitu 1) bagaimanakah pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang pensiun dengan permintaan sendiri berdasarkan undang-undang jabatan notaris. 2)bagaimanakah tantangan dalam pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang pensiun dengan permintaan sendiri di kota padang dan padang pariaman. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian empiris. Dalam penelitian ini diperoleh pemahaman apabila notaris berhenti dengan permintaan sendiri semua protokolnya akan diserahkan kepada notaris pengganti dan ditunjuk oleh MPD. Namun dalam implementasi yang terjadi di kota Padang dan Padang Pariaman bahwa penyerahan diawali dengan adanya Notaris yang berhenti dengan permintaan sendiri dan diberitahukan kepada MPD oleh MPD akan di proses surat Kementrian Hukum dan HAM RI. Dalam implementasinya penyerahan protokol notaris di kota Padang dan Padang Pariaman tidak berjalan dengan lancar. Karena adanya kendala keterlambatan waktu dalam proses penerbitan surat keputusan menteri sehingga untuk serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperkenakan menurut UUJN. Selama keputusan tersebut belum ada, maka notaris tidak dapat menerbitkan salinan akta bagi pihak yang membutuhkan. Namun dalam prakteknya di kota Padang dan Padang Pariaman kendala tersebut dapat diatasi dengan memberikan pengertian kepada para pihak atau notaris yang akan pensiun.

Katakunci : Implementasi; Protokol Notaris Yang Pensiun Permintaan Sendiri; Undang-Undang Jabatan Notaris Di Kota Padang Dan Padang Pariaman

**IMPLEMENTATION OF RETIREMENT DELIVERY OF NOTARY
PROTOCOLS WITH OWN REQUEST BASED ON THE NOTARY
POSITION LAW AND IMPLEMENTATION IN THE CITY OF PADANG
AND PADANG PARIAMAN**

**(Reski Novita Syahrul, 192012015, Notary Masters Study Program, Faculty of
Law, Andalas University, Supervisors Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn., and Dr.
Delfiyanti, SH.MH)**

ABSTRACT

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as defined in this Law or based on other Laws. Notary is a position that has been regulated in the Legislation. However, there are times when a notary will end his term of office either by stopping at his own request and in the UUJN it is also stated that a notary who stops at his own request must report to the MPD and indicate who will be a substitute Notary for submitting the protocol. The problem is how the process of submitting the protocol can reach a substitute notary and there are problems in this thesis, namely 1) how is the implementation of submitting the protocol of a retired notary at his own request based on the notary's office law. 2) what are the challenges in implementing the submission of notary protocols that retire at their own request in the cities of Padang and Padang Pariaman. The method used in this thesis is an empirical research method. In this study, an understanding was obtained that if a notary stops at his own request, all protocols will be submitted to a replacement notary and appointed by the MPD. However, in the implementation that occurred in the cities of Padang and Padang Pariaman, the handover began with a Notary who stopped at his own request and was notified to the MPD that the MPD would process a letter from the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. In its implementation, submission of notary protocols in the cities of Padang and Padang Pariaman did not go smoothly. Due to time delays in the process of issuing ministerial decrees, the handover of the notary protocol to a replacement notary is delayed and does not comply with the time period allowed according to UUJN. As long as there is no such decision, the notary cannot issue a copy of the deed for those who need it. However, in practice in the cities of Padang and Padang Pariaman these obstacles can be overcome by providing understanding to the parties or notaries who will retire.

Keywords: Implementation; Retirement Notary Protocol at Own Request; Law on the Position of Notaries in the City of Padang and Padang Pariaman